

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN PANYILEUKAN KOTA BANDUNG

Dewi Loka Wardiya Ningsih¹, Yuyun Mulyati²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

Email Korespondensi : yuyunmulyati33@gmail.com

Submitted: 21-07-2025; Accepted: 03-10-2025; Published : 07-10-2025

ABSTRAK

Upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah dengan mengeluarkan berbagai program seperti Bank Sampah, Kang Pisman, hingga Kawasan Bebas Sampah dengan tujuan agar sampah selesai dari sumbernya, tetapi program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal salah satunya di wilayah Kecamatan Panyileukan karena kurangnya partisipasi masyarakat sebagai sumber daya modal sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan modal sosial dilakukan dalam pengolahan sampah rumah tangga berbasis komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi kepustakaan, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil temuan di lapangan dengan menggunakan indikator teori modal sosial dari Putnam yang terdiri dari kepercayaan, jaringan keterlibatan sipil, dan norma timbal balik (Sudarmono, 2021), ditemukan bahwa untuk membangun kepercayaan di masyarakat dibentuk lembaga dengan skala tapak yang memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengolahan sampah tetapi belum semua warga mau mengolah sampahnya sendiri. Lembaga mampu membangun jaringan di tingkat lokal, perguruan tinggi, hingga pemerintah melalui dinas tetapi masih lemah membangun jaringan dengan dunia usaha dan *non governmental organization*, selain itu lembaga belum mampu melakukan administrasi dengan baik. Baik lembaga, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah melalui dinas terkait merasakan dampak positif berupa hubungan kerjasama. Berdasarkan temuan tersebut modal sosial yang dilakukan oleh lembaga masyarakat di masing-masing wilayah Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas belum optimal.

Kata Kunci: Modal Sosial, Pengelolaan Sampah, Kecamatan Panyileukan

ABSTRACT

The Bandung City government's efforts to address the waste problem by issuing various programs such as Bank Sampah (Waste Bank), Kang Pisman, and Kawasan Bebas Sampah (Waste-Free-Zone) aim to resolve waste at its source, however these programs have not yielded optimal results, as seen in the Panyileukan district, due to the lack of community participation as a source of social capital. This research aims to examine how social capital is utilized in community-based household waste management. The research method used is qualitative research with data collection including observation, interviews, and documentation, as well as a literature study. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. Field findings using Putnam's social capital theory indicators-which consist of trust, networks of civil involvement, and norms of reciprocity (Sudarmono, 2021)-indicate that building trust in the community, a local-scale institution was formed to provide socialization and education on waste management, but not all residents are willing to process their own waste. The institution has been able to build networks at the local level, universities, and government through relevant agencies, but it is still weak in building networks with the business sector and non-governmental organizations. Furthermore the institution has not been able to manage administration properly. The institution, the community, universities, and the government all feel.

Key word: Social Capital, Waste Management, Panyileukan Subdistrict

PENDAHULUAN

Kota Bandung termasuk salah satu kota yang menghadapi permasalahan sampah, hal ini terlihat dari penumpukan sampah di beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) diantaranya TPS 3R Gumuruh, TPS Pasar Kosambi, dan TPS Pasar Caringin, kondisi TPS pada ketiga tempat tersebut bercampur antara jenis sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah yang menumpuk mengakibatkan bau yang tidak sedap, pemandangan yang buruk, serta menimbulkan berbagai penyakit. Timbulan sampah Kota Bandung pada tahun 2024 berdasarkan data dari SIPSN sebesar 1.496,31 ton/hari dengan tiga komposisi jenis sampah terbanyak adalah sampah sisa makanan sebesar 44,52%, sampah plastik sebesar 16,70%, dan sampah lainnya sebanyak 11,68% (SIPSN, 2024). Kota Bandung tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sendiri sehingga Kota Bandung menjalin kerjasama dengan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, namun kondisi saat ini TPA Sarimukti mengalami over kapasitas (Aliansi Zero Waste Indonesia 2023). Oleh sebab itu, perlunya pengelolaan sampah dari sumber untuk mengurangi beban dan masa pakai TPA.

Pengelolaan sampah di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, untuk mencapai tujuan tersebut diperkenalkan program oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang bernama Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) sejak dari sumbernya dengan tujuan program ini bisa membentuk kebiasaan baik serta menumbuhkan kesadaran pada setiap individu untuk dapat mengurangi produksi sampahnya serta mengelolanya (Suhendar, 2021). Kegiatan dalam program Kang Pisman diantaranya mengurangi sumber timbulan sampah dengan membawa tas belanja dan wadah makanan sendiri, berhenti makan dan minum sebelum kenyang, memilah sampah organik, anorganik dan residu serta memanfaatkan sampah organik dan anorganik menjadi produk yang bermanfaat, sedangkan residunya di angkut ke TPS dan TPA (Dina et al., 2024)

Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah, pemerintah

Kota Bandung memperkenalkan program Bank Sampah yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bandung. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melaksanakan sebuah program yaitu Kawasan Bebas Sampah (KBS) dengan prinsip keterlibatan warga, kemandirian, efisiensi pengurangan sampah, pelestarian lingkungan dan keterpaduan kawasan (Djulianti & Ainun, 2018).

Pelaksanaan KBS diterapkan ditingkat skala tapak atau Rukun Warga (RW) dengan membentuk kelembagaan masyarakat yang nantinya akan didampingi dan dibina oleh tenaga pendamping wilayah KBS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. Kota Bandung sendiri pada saat ini telah memiliki 472 RW KBS dari 1.597 RW. Pada dasarnya program KBS membantu masyarakat bagaimana mereka dapat mengelola dan mengolah sampahnya secara mandiri, dalam pelaksanaannya program KBS berjalan beriringan dengan program Kang Pisman. Metode-metode yang diperkenalkan untuk mengolah sampah organik meliputi Kang Empos (Karung, Ember dan Kompos), Loseda (Lodong Sesa Dapur), Wasima (Wadah Sisa Makanan), Biopori, Bata Terawang, Maggotisasi, *Eco Enzym*, dan lain-lain dengan tujuan sampah organik tersebut dapat berubah menjadi produk seperti kompos, pupuk alami serta pakan ternak) (Farahristanti & Wardhani, 2024) Sedangkan, sampah anorganik dapat disedekahkan kepada petugas sampah maupun pencari barang rongsok, bisa juga disetorkan kepada bank sampah terdekat. Potensi adanya KBS dapat mengurangi timbulan sampah di Kota Bandung.

Dari sekian banyak program pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dan menekan timbulan sampah di Kota Bandung, belum semuanya terlaksana dengan baik seperti pada penelitian (Fidowaty & Nurnovianti, 2025) program Kang Pisman dinilai tidak efektif karena belum terpenuhinya sistem pengelolaan dan transportasi sampah, kurangnya peralatan kebersihan, penggunaan plastik yang tinggi disertai kurangnya kesadaran masyarakat pada pentingnya pengelolaan sampah, meskipun mereka memahami tujuan dari program Kang Pisman. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan program diperlukan kolaborasi antar kepentingan salah satunya

pelibatan masyarakat untuk membuat sistem pengelolaan sampah (Zahra et al., 2025).

Mengenai program Bank Sampah, berdasarkan situs Open Data Kota Bandung, jumlah Bank Sampah di Kota Bandung ada 587 unit, namun diketahui bahwa jumlah anggota nasabah dari masing-masing unit bank sampah yang tersebar di Kota Bandung ada yang memiliki nol nasabah. Program Bank Sampah dinilai belum membawakan hasil yang signifikan karena sifat program yang terlalu parsial, teknik, serta tidak secara menyeluruh, hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi kepada warga mengenai pemanfaatan sampah menjadi rupiah atau emas (Mulyawati et al., 2024). Implementasi Bank Sampah Induk Kota Bandung belum optimal dan berkelanjutan karena kurangnya kapasitas petugas pengelola bank sampah, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan dinas terkait untuk peningkatan kapasitas petugas agar tujuan dibentuknya bank sampah dapat tercapai (Sendari & Sufianti, 2024).

Penyebab lainnya adalah belum banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program-program tersebut, Pemerintah terlalu fokus untuk memberikan sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pengelolaan sampah, sehingga kurang dalam memberikan respon pada aspek perubahan paradigma masyarakat terhadap sampah (Sitompul & Laksmmono, 2023). Bertolak dari temuan tersebut menekankan bahwa pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dari pemerintah, menurut (Mulyati et al., 2024) Partisipasi masyarakat bukan hanya berperan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dalam konteks permasalahan sampah, partisipasi masyarakat merupakan kunci solusi untuk menjawab tantangan permasalahan sampah di perkotaan (Lasaiba, 2024).

Selain itu dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kapasitas komunitas dan modal sosial yang pada akhirnya akan membentuk kesadaran masyarakat serta menimbulkan hubungan sosial (Mappasere et al., 2024). Pentingnya perubahan paradigma masyarakat terhadap sampah akan membantu pemerintah Kota Bandung dalam menekan

angka timbulan sampah, karena permasalahan sampah sudah selesai sejak dari sumber. Oleh sebab itu masyarakat merupakan sumber daya untuk membantu mencapai tujuan dari program-program pemerintah yang salah satunya adalah program Kawasan Bebas Sampah (KBS) dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, artinya masyarakat merupakan aset modal sosial yang dapat dimanfaatkan.

Modal sosial menurut Lyda Judson Hanifan dalam (Munif 2022) bukan berarti modal yang berupa materi tetapi aset dalam berkehidupan bermasyarakat, artinya meskipun modal tersebut hanya berupa niat baik, simpati, serta menjalin hubungan sosial antar individu yang membentuk sebuah kelompok. Hal tersebut didukung oleh Pierre Bourdieu dalam (Munif 2022) modal sosial merupakan hubungan sosial sebagai penyedia sumber daya dalam bentuk *support* untuk mencapai tujuan, artinya bertambahnya anggota individu dan kelompok maka bertambah pula jejaring sosial. Menurut Putnam dalam (Munif 2022) modal sosial bercirikan kepercayaan, norma dan jejaring dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Field dalam (Montolalu 2025) kesimpulan modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam merupakan sebuah ketentuan dalam membentuk suatu pemerintahan yang efektif karena dengan adanya jaringan akan meningkatkan komunikasi dan kepercayaan pada masyarakat, dengan kepercayaan akan meningkatkan norma untuk tolong-menolong, sehingga keberhasilan yang telah diraih bersama akan membentuk kerjasama. Dari pernyataan beberapa ahli dapat diketahui bahwa konsep dari modal sosial pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang diwujudkan dalam kebersamaan dan kerjasama para anggota yang memiliki kepentingannya yang sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada praktiknya, modal sosial dapat membantu jalannya pembangunan agar berjalan secara efektif dan efisien (Sayuti et al., 2024) Selain itu modal sosial dapat mengurangi ketimpangan sosial (Yunita et al., 2025), modal sosial juga dapat membentuk sistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Fatonah, 2025).

Unsur-unsur dari modal sosial terdiri dari nilai norma, jaringan dan kepercayaan. Kepercayaan merupakan kunci dari keberhasilan

untuk membentuk jaringan sosial yang luas dalam konteks kehidupan bermasyarakat, artinya tingginya tingkat kepercayaan akan berdampak pada tingginya keinginan untuk bekerjasama. Tumbuhnya kepercayaan berasal dari jaringan dan norma (Sudarmono, 2021). Kepercayaan menjadi landasan yang kuat dalam membangun komunikasi (Khairussalam. et al., 2024).

Jaringan Keterlibatan Sipil bisa diartikan sebagai perkumpulan kelompok maupun asosiasi yang berfungsi sebagai jembatan masyarakat yang dapat mengembangkan jejaring sosial serta meningkatkan rasa solidaritas dan partisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Jaringan ini dapat berbentuk formal dan informal, serta jaringan tersebut tersusun baik secara horizontal maupun vertikal (Sudarmono, 2021). Selain itu jaringan keterlibatan sipil membuka peluang dalam menjangkau sumber daya yang lebih besar seperti dukungan dari pihak lain untuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami serta menjadi sebuah fasilitas untuk kolaborasi antar kelompok ataupun kelembagaan lainnya (Khairussalam. et al., 2024).

Norma timbal balik dapat dipahami sebagai aksi yang mengatur hak dari satu pihak kepada pihak lainnya. Hal tersebut memberikan dampak efisiensi dan kemudahan dalam melakukan kerjasama dengan ciri-ciri saling menguntungkan bagi kedua pihak, yang pada akhirnya norma timbal balik berakhir pada sikap saling percaya (Sudarmono, 2021). Norma timbal balik dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman individu yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat (Khairussalam. et al., 2024).

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung karena lokasi tersebut sudah berhasil mencapai 100 persen RW Kawasan Bebas Sampah (Diskominfo Kota Bandung, 2024), setelah melakukan observasi awal di lapangan mengenai modal sosial masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga ditemukan dari segi kepercayaan belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memilah sampah dan menyetorkannya kepada kelembagaan yang mengolah sampah di wilayahnya cenderung masih menyatukan sampah dan membuangnya di tanah kosong, dari segi jaringan keterlibatan sipil belum terjalin

dengan baik karena kelembagaan masyarakat di masing-masing wilayah belum mampu membuat jejaring dengan organisasi luar dan dari segi norma timbal balik tidak semua kelembagaan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan sarana dari organisasi luar sehingga biaya operasional menjadi berat dan tidak berkelanjutan pengelolaan sampahnya.

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana modal sosial yang dilakukan di Kecamatan Panyileukan dengan menggunakan teori modal sosial dari Putnam (dalam Sudarmono 2021) yang terdiri dari tiga unsur yaitu kepercayaan, jaringan keterlibatan sipil dan norma timbal balik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran terkait pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dengan teknik pengumpulan data triangulasi dengan menggabungkan observasi di lapangan, wawancara dengan para *stakeholder* dan dokumentasi (Sugiyono, 2020)

Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik studi kepustakaan yaitu mencari informasi melalui buku-buku, regulasi, berita di *website online* untuk mencari pendapat para ahli dan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Cara analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020)

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun jenis informan terbagi menjadi tiga yaitu, 1) Pendamping Wilayah KBS di Kecamatan Panyileukan berinisial Bapak R, sebagai informan kunci; 2) Ketua Lembaga Kampung Kebun Organik Soka 11 dari Kelurahan Cipadung Kulon berinisial Bapak S, dan Ketua Lembaga Kelompok Tani Asri dari Kelurahan Cipadung Kidul berinisial Ibu T sebagai informan utama; dan 3) Masyarakat berinisial Ibu C, Ibu G dan Bapak I, sehingga total informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dimulai dari bulan April hingga bulan Juni 2025 yang berlokasi di wilayah

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Alasan lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan kecamatan dengan 100% wilayahnya berstatus Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung terdiri dari 4 kelurahan yakni, Kelurahan Mekarmulya, Kelurahan Cipadung Kulon, Kelurahan Cipadung Wetan, dan Kelurahan Cipadung Kidul dengan luas wilayah 551,42 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 33.038 jiwa dan 8.201 Kepala Keluarga. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung memiliki 37 Rukun Warga (RW) dan 185 Rukun Tetangga (RT). Lahan didominasi oleh persawahan dan penghasilan penduduknya berasal dari jasa perdagangan dan industri (Multisite Bandung, n.d).

Setelah mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi, diketahui temuan di lapangan, pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas yang dilakukan di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan mengikuti program Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang terintegrasi dengan pertanian dengan prinsip *waste to food*, menggunakan berbagai macam metode pengolahan, seperti untuk pemanfaatan sampah organik yang berasal dari aktivitas rumah tangga dapat dijadikan kompos, pupuk cair, dan pakan ternak, contohnya loseda (lodong sesa dapur), wasima (wadah sisa makanan), eco enzyme, rumah daun, serta rumah maggot. Pemanfaatan sampah anorganik dapat ditabung di bank sampah atau disedekahkan kepada pemulung (Wawancara, 24 April 2025).

Hasil analisis penelitian dilapangan dengan menggunakan indikator teori dari Putnam mengenai modal sosial masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang terdiri dari indikator kepercayaan, jaringan keterlibatan sipil dan norma timbal balik dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepercayaan

Menurut Putnam dalam (Sudarmono 2021) kepercayaan dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dari terbentuknya jaringan sehingga kepercayaan harus dibangun dengan

lebih baik terutama untuk menjalin komunikasi. Temuan dilapangan seperti di salah satu wilayah Kelurahan Cipadung Kulon dibentuk kelembagaan masyarakat dalam skala tapak (Rukun Warga) disertai dengan surat keputusan dari kelurahan setempat yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pada warga mengenai aktivitas pengelolaan sampah di wilayahnya.

Kelembagaan masyarakat menginstruksikan kepada warga untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri di rumah masing-masing, agar instruksi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kelembagaan memberikan contoh terlebih dahulu, dengan menarik dan memilah sampah organik dan anorganik yang berasal dari warga, kemudian sampah yang sudah dipilah dimanfaatkan seperti sampah organik di olah menjadi media tanam dan ditanami berbagai macam jenis sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, cabai rawit, kegiatan pengolahan sampah organik berlangsung selama 40 hari dan hasil panen sayuran dibagikan kepada keluarga balita pada saat aktivitas penimbangan di posyandu sebagai bantuan pangan pada program percepatan penurunan stunting. Berikut kutipan wawancara bersama Bapak R sebagai Pendamping Wilayah KBS di Kecamatan Panyileukan yang ikut berkunjung ke Lembaga Kampung Kebun Organik Soka 11 Cipadung Kulon,

“Prinsip kami dalam membentuk wilayah dengan status Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang terintegrasi dengan pertanian di Kecamatan Panyileukan adalah dengan kepercayaan, saya bersama para ketua kelembagaan masyarakat di masing-masing wilayah bekerja sama, jika kami konsisten melakukan pengolahan sampah dan terlihat oleh masyarakat hasilnya, maka masyarakat akan mau berpartisipasi.” (Wawancara, 24 April 2025).

Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan warga percaya dan mau bekerja sama dengan kelembagaan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Sampah organik disetorkan kepada kelembagaan masyarakat untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi media tanam maupun pupuk dan ditanami sayuran yang akan menghasilkan bahan makanan sehat organik tanpa pestisida, kemudian sampah anorganiknya disetorkan ke bank sampah yang masih menginduk di

Kelurahan Cipadung Kulon, adapun alasan tidak didirikan bank sampah secara mandiri di wilayah tersebut karena adanya benturan kepentingan antara kelembagaan masyarakat dengan petugas pengangkut sampah, hal ini disebabkan petugas pengangkut sampah merasa kehilangan mata pencahariannya karena warga disana sudah memilah sampah secara mandiri (Wawancara, 24 April 2025).



Gambar 1 Loseda



Gambar 2 Wasima



Gambar 3 Pemanenan Sayur

Sumber: Dokumentasi Kegiatan oleh Peneliti, 2025

Gambar 1 Metode Pengolahan Sampah Organik dan Pemanfaatannya

Hal yang sama dilakukan di salah satu wilayah Kelurahan Cipadung Kidul untuk meningkatkan kepercayaan warga dalam memilah sampah secara mandiri, kelembagaan masyarakat melakukan kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Kolaborasi tersebut menghasilkan sebuah metode pengolahan sampah organik. Metode yang dilakukan menggunakan rumah daun, rumah maggot dan *octaco* (octagonal composter)



Gambar 4 Rumah Daun dan Rumah Maggot



Gambar Flyer Octaco

Sumber: Dokumentasi Kegiatan oleh Peneliti dan Flyer dari informan, 2025

Gambar 2 Metode Pengolahan Sampah Organik Rumda dan Octaco

Metode Rumda (Rumah Daun) yaitu aktivitas mengolah sampah organik secara alamiah, karena tidak perlu diaduk untuk menstabilkan suhu. Pertama masukkan sampah daun kering sebagai dasar, lalu masukkan

sampah organik dengan cara dipecah-pecah agar tidak menggumpal, terakhir tutup dengan daun kering, selanjutnya lakukan hal serupa ketika akan memasukkan sampah organik kembali.

Metode *octaco* yaitu aktivitas mengolah sampah organik dengan memanfaatkan keranjang, kemudian sabut kelapa dan kasgot (sisa kotoran maggot) sebagai bahan dasar, selanjutnya memasukkan sampah organik dapur lalu ditimpa dengan kasgot dan ulangi sampai penuh dan kompos siap digunakan (Wawancara 28 April 2025), untuk meningkatkan kepercayaan warga agar mau bekerja sama dalam pembuatan *octaco* dirumahnya masing-masing, maka kelembagaan masyarakat melakukan perlombaan pembuatan *octaco* dengan berbagai hadiah menarik berupa kebutuhan rumah tangga seperti sembako dan sabun untuk mencuci pakaian dan alat makan sehingga kegiatan *octaco* dengan tujuan pengolahan sampah organik skala rumah tetap berjalan hingga saat ini, berikut kutipan wawancara bersama Ibu T sebagai Ketua Kelompok Tani Buruan Sae Asri di Cipadung Kidul,

“Kami mengadakan perlombaan untuk menarik partisipasi masyarakat yang didominasi oleh para ibu rumah tangga untuk membuat octaco, hadiahnya berupa alat kebutuhan rumah tangga dan mereka sangat antusias serta melanjutkan octaconya di rumah masing-masing.” (Wawancara, 28 April 2025).

Pengelolaan sampah di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung sudah dilakukan selama kurang lebih satu sampai tiga tahun lamanya. Pembentukan kebiasaan pemilahan sampah dari rumah oleh warga kurang lebih selama tiga bulan, dengan aktivitas tersebut Kecamatan Panyileukan berhasil mewujudkan Kawasan Bebas Sampah (KBS) sebanyak 100 persen RW KBS karena permasalahan sampah sudah selesai dari sumber. Standar minimal suatu wilayah dikatakan sebagai wilayah KBS adalah minimal 30% rumah memilah sampah dan 30% pengurangan sampah di wilayahnya (Wawancara, 24 April 2025).

Hasil pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang datanya diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK) Kota Bandung sebagai berikut,

**Tabel 2 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga di Kecamatan Panyileukan Kota
Bandung Tahun 2024**

No.	Bulan	Persentase Warga yang Memilah	Timbunan sampah (kg)
1.	Januari	52,74%	395.808,2
2.	Februari	63,99%	305.848,6
3.	Maret	56,14%	219.724,3
4.	April	56,42%	214.910,2
5.	Mei	57,20%	219.611,6
6.	Juni	57,60%	212.576,4
7.	Juli	57,91%	219.644,3
8.	Agustus	58,44%	219.692,3
9.	September	58,85%	212.613,4
10.	Oktober	54,14%	213.121,5
11.	November	52,09%	320.494,1
12.	Desember	49,48%	329.424,3
Jumlah			3.083.469

Sumber: Laporan Monev dari DLHK Kota Bandung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung mengalami dinamika naik dan turun setiap bulannya, baik pada persentase jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah serta timbunan sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut, terutama pada bulan Oktober, November, dan Desember pemilahan sampah oleh masyarakat menurun.

Rata-rata warga yang melakukan pemilahan sampah di Kecamatan Panyileukan selama tahun 2024 kurang lebih sekitar 56,25% atau 18.584 jiwa dari total jumlah penduduk 33.038 jiwa. Selain itu timbunan sampah yang dihasilkan menyumbang kurang lebih sekitar 5,65% setiap tahunnya dari total timbunan sampah di Kota Bandung sebesar 546.151,49 ton per tahunnya. Dampak dari indikator kepercayaan dari masyarakat pada lembaga masyarakat dengan kegiatan pemilahan sampah dan mengolah sampah secara mandiri dapat membantu meringankan beban dari pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung untuk mengangkut sampah ke TPA karena sampah organik dan anorganiknya sudah selesai dikelola

di wilayah sendiri sehingga petugas hanya mengangkut residunya saja, berikut laporan jumlah sampah di Kecamatan Panyileukan berdasarkan jenisnya.

**Tabel 3 Laporan Jumlah Sampah di
Kecamatan Panyileukan Berdasarkan
Jenisnya Tahun 2024**

No.	Bulan	Organik (kg)	Anorganik (kg)	Residu (kg)
1.	Januari	47.785,81	68.853,96	279.168,5
2.	Februari	51.463,98	58.815,96	195.569,1
3.	Maret	51.297,66	42.681,51	125.805,1
4.	April	50317,14	41746,08	122877
5.	Mei	52.596,43	42.681,51	124.363,2
6.	Juni	51.345,61	41.304,7	119.926,1
7.	Juli	53.565,43	42.681,51	123.397,3
8.	Agustus	54307,79	42681,51	122.721
9.	September	52.742,69	41.304,7	118.566
10.	Oktober	54.646,19	41.420,61	117.054,7
11.	November	87.581,83	62.330,99	110.581,4
12.	Desember	95131,09	64076,38	170116,8
Jumlah		702.781,6	590.579,4	1.730.146

Sumber: Laporan Monev dari DLHK Kota Bandung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 3 diketahui bahwa pada faktanya setiap tahun kelembagaan masyarakat mengolah sampah organik dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 702.781,6 kg sampah organik per tahunnya. Selain itu bertolak dari tabel dapat diketahui pula jenis sampah yang mendominasi adalah jenis sampah residu yang biasanya berasal dari sisa kemasan plastik, popok, pembalut, puntung rokok, wadah styrofoam, sampah elektronik dan sampah lainnya yang tidak dapat didaur ulang menjadi produk baru.

Perlunya kesadaran untuk tidak menimbulkan sampah baru yaitu dengan kurangi sampah. Cara mengurangi timbunan sampah dapat dilakukan seperti selalu membawa tas belanja sendiri agar tidak menggunakan kantong plastik serta membawa wadah sendiri ketika akan membeli makanan dan cemilan. Namun, kembali lagi upaya yang telah dilakukan belum sejalan dengan apa yang diharapkan, observasi di lapangan pada tanggal 28 April 2025 ditemukan sebagian warga membuang sampah yang tercampur ke lahan kosong sehingga menimbulkan tumpukan dan serakan sampah di sepanjang jalan dan ada juga sampah warga yang diletakan kemudian dibakar di lapangan kosong pada pagi hari, perilaku ini ditemukan di wilayah Kelurahan Cipadung Kidul dan Kelurahan Cipadung Wetan, oleh sebab itu perangkat

kewilayahan setempat yaitu kelurahan berupaya mengatasinya dengan membuat spanduk-spanduk larangan membuang sampah di lahan kosong serta melakukan pemantauan di wilayahnya.

Sejalan dengan penelitian dari (Sitompul & Laksmo, 2023) bahwa penyebab belum optimalnya sebuah program pemerintah dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi hanya saja perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian mengenai aspek yang belum banyak dibahas yaitu modal sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut yang disesuaikan dengan konsep teori Modal Sosial dari Putnam dengan indikator teori kepercayaan diketahui bahwa indikator tersebut belum terlaksana dan terjalin dengan baik karena sulitnya mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah karena menganggap masalah sampah merupakan tugas dari pemerintah dan bukan merupakan tugas individual. Warga beralih telah membayar iuran kebersihan setiap bulannya, jadi mereka tidak merasa bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari merupakan tanggung jawab masing-masing (Wawancara, 24 April 2024), hal ini menghambat dalam membangun modal sosial sehingga diperlukan membuat aturan tertulis oleh kelembagaan masyarakat dibantu dengan Ketua RW agar memberikan sanksi tegas terhadap warga yang tidak patuh mengolah sampahnya sendiri dari sumbernya.

Jaringan Keterlibatan Sipil

Menurut Putnam dalam (Sudarmono 2021) jaringan keterlibatan sipil diperlukan untuk membangun jejaring sosial yang akan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan fakta di lapangan beberapa kelembagaan masyarakat melakukan kegiatan rutin seperti gotong royong membersihkan lingkungan, menanam dan memanen sayur sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan hasil dari sampah menjadi bahan pangan (Wawancara 24 April 2025).

Kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Panyileukan membuat bahan publikasi melalui spanduk mengenai ajakan untuk membuat kompos sendiri dan larangan

membuang sampah sembarangan, kemudian membuat stiker yang akan ditempel bagi rumah yang penghuninya telah melakukan aksi pemilahan sampah, dan memanfaatkan dinding warga untuk dibuat mural tentang ajakan kebersihan. Selain itu kelembagaan masyarakat membuat video demonstrasi mengenai pengolahan sampah yang disebarluaskan melalui social media dan aplikasi pesan pribadi, berikut salah satu kutipan wawancara bersama Ibu T sebagai Ketua Kelompok Tani Buruan Sae Asri Kelurahan Cipadung Kidul,

“Saya membuat tutorial mengolah sampah organik dengan metode octaco untuk disebarluaskan di grup whatsapp.”
(Wawancara, 28 April 2025).

Hal tersebut dilakukan untuk mengajak dan membantu membentuk kesadaran pada masyarakat akan pentingnya mengelola dan mengolah sampahnya secara mandiri, dimulai dari aksi yang paling sederhana yaitu memilah sampah dari rumah, setelah dipilah disetorkan kepada kelembagaan masyarakat untuk diolah atau boleh diolah sendiri menjadi kompos, *eco enzyme*, pupuk, dll. Kelembagaan masyarakat mampu membangun jejaring di tingkat lokal seperti kunjungan dari kecamatan, serta dari masing-masing kelurahan untuk memantau dan memonitoring kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu kelembagaan masyarakat mampu membangun jejaring dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan wilayah dari masing-masing instansi, berikut kutipan wawancara bersama Bapak R sebagai Ketua Lembaga Kampung Kebun Organik Soka 11 Cipadung Kulon,

“Setelah kami konsisten melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri di wilayah, kami banyak dikunjungi oleh kecamatan, rombongan dari kecamatan lain di Kota Bandung, dari dinas serta dari sekolah-sekolah untuk belajar dan berbagi pengalaman.” (Wawancara 24 April 2025).

Tenaga pendamping wilayah yang diutus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat

dalam hal berbagi metode pengolahan sampah, pembuatan sistem pengangkutan sampah organik, strategi komunikasi kepada warga, memonitoring dan mengevaluasi wilayah binaannya dan melaporkannya kepada dinas sehingga pengajuan wilayah menjadi RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) ke DLHK Kota Bandung. Pendamping wilayah. KBS dapat membantu memberikan solusi jika terjadi hambatan di lapangan (Wawancara, 24 April 2024).

Tenaga pendamping wilayah yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kelembagaan masyarakat mengenai solusi dari hambatan-hambatan yang dialami pada saat melakukan penanaman hingga pemanenan hasil pertanian serta DKPP membantu kelembagaan masyarakat dalam menyediakan bibit sayur. (Wawancara, 25 April 2025). Selain itu, terdapat wilayah yang kelembagaan masyarakatnya mampu membangun jejaring dengan perguruan tinggi sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan bertukar ilmu pengetahuan seperti metode kompos yang diberi nama *octaco*, hasilnya pada sisi kelembagaan masyarakat dapat terbantu dalam melakukan pengolahan sampah rumah tangga sejak dari sumber, pada sisi perguruan tinggi terbantu untuk melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengolahan sampah organik menggunakan *octaco* masih berjalan hingga sekarang.

Kelembagaan masyarakat mampu membangun jejaring ditingkat provinsi yaitu dibuktikan dengan kunjungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Jawa Barat, serta dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dan kelembagaan masyarakat di salah satu wilayah Kelurahan Cipadung Kulon pernah mendapat kunjungan dari tokoh nasional yaitu Bapak Acil Bimbo, kunjungan-kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan, menikmati hasil kebun organik dan dukungan serta motivasi agar kegiatan pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pertanian organik dapat berkelanjutan.

Dampak dari indikator jaringan keterlibatan sipil dalam temuan penelitian ini adalah wilayah tersebut dikenal dan diketahui keberadaannya sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan akses fasilitas seperti sarana dan prasana dari pemerintah maupun perusahaan swasta, menghasilkan metode yang tepat dalam pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing baik metode yang diberikan oleh dinas maupun dari perguruan tinggi.

Namun, temuan fakta di lapangan baik masing-masing wilayah yang berada di lingkungan Kecamatan Panyileukan belum semuanya melaksanakan administrasi dengan rapi, seperti pembukuan daftar hadir anggota, daftar hadir tamu, buku kas, dokumentasi kunjungan maupun kegiatan, serta kurangnya memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi. Selain itu masih banyak kelembagaan yang kurang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak dan disabilitas, serta kurangnya motivasi dari kelembagaan masyarakat karena menganggap kegiatan ini hanya sekedar dilaksanakan saja, sehingga hasilnya terkesan seadanya dan tidak berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa seharusnya sebuah program diikuti dengan pendanaannya karena tidak semua kelembagaan masyarakat memiliki dana iuran dari anggota, sehingga pembiayaan operasional kelembagaan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya berasal dari dana pribadi (Wawancara, 26 April 2024). Berdasarkan data yang diakses melalui Sistem Registri Nasional (SRN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berikut data kelembagaan masyarakat di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang sudah dan belum memiliki jejaring dengan organisasi *non-governmental* maupun perguruan tinggi.

Tabel 4 Jaringan Sosial Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan

No.	Nama Lembaga Masyarakat	Memiliki Jejaring	Belum Memiliki Jejaring	Bentuk Dukungan
1.	Kampung Kebun Organik Soka 11	✓	—	Lahan untuk berkebun dari Tower Group
2.	Proklim RW 02 Kelurahan	—	✓	—

	Cipadung Wetan			
3.	Kelompok Tani Asri RW 05	✓	—	Pembuatan kompos dengan metode <i>octaco</i> dari Perguruan Tinggi dan Bank Sampah yang dikelola oleh DKM Masjid
4.	Proklim RW 06 Kelurahan Cipadung Wetan	✓	—	Pendanaan dari dunia usaha.
5.	Proklim RW 04 Kelurahan Cipadung Kulon	✓	—	Pendanaan dari dunia usaha.
6.	Proklim RW 07 Kelurahan Cipadung Kulon	—	✓	—

Sumber: SRN Kemenlkh, 2025

Bertolak dari data dalam tabel 4 diketahui bahwa tidak semua kelembagaan masyarakat di Kecamatan Panyileukan yang mampu membangun jejaring dari sektor dunia usaha, *non governmental organization (NGO)*, maupun perguruan tinggi untuk mendapatkan dukungan. Selain itu masih ditemukan juga di beberapa wilayah lain yang masih belum konsisten dalam melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, hal paling kecil seperti pemilahan sampah yang dilakukan di rumah masing-masing. Berdasarkan temuan-temuan tersebut tentunya akan menghambat pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Sejalan dengan penelitian dari (Zahra et al., 2025) bahwa perlunya kolaborasi antara *stakeholder* terutama dalam pengelolaan sampah serta pentingnya membangun jejaring sosial dari berbagai organisasi, hanya perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang diambil dengan sudut pandang modal sosial masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan yang disesuaikan dengan konsep teori Modal Sosial dari Putnam salah satunya indikator teori jaringan keterlibatan sipil diketahui bahwa indikator tersebut belum terlaksana dan terjalin dengan baik, karena ketidakmampuan lembaga masyarakat di masing-masing wilayah untuk membangun jejaring dengan organisasi lainnya,

selain itu belum pahamnya lembaga masyarakat dalam melakukan administrasi, sehingga ini menghambat proses modal sosial masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Norma Timbal Balik

Menurut Putnam dalam (Sudarmono 2021) Norma timbal balik dapat dipahami sebagai tindakan yang mengatur hak para pihak dengan ciri saling menguntungkan sehingga memudahkan untuk bekerjasama karena sudah terbangun rasa saling percaya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama para informan temuan dilapangan, norma timbal balik antara kelembagaan masyarakat dan warga dapat dilihat dari kemauan warga untuk melakukan pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan pengomposan sampah serta 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) secara mandiri sehingga memudahkan kelembagaan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dan hasil dari pengelolaan sampah seperti pemanenan bahan pangan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, selain itu warga dapat menabung sampah organik di bank sampah yang suatu saat dapat diambil berupa uang.

Norma timbal balik antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan seperti di Kelurahan Cipadung Kidul memberikan dana PIPPK dan motor triseda, sedangkan di Kelurahan Cipadung Kulon memberikan sarana bak sampah untuk menampung sampah residu serta bantuan dana PIPPK dari Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Dukungan-dukungan tersebut bertujuan sebagai bantuan operasional pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing-masing kelembagaan masyarakat, berikut kutipan wawancara bersama Ibu T sebagai Ketua Lembaga Kelompok Tani Buruan Sae Asri Cipadung Kidul,

“Kita mendapatkan sarana dari PIPPK dan motor triseda untuk mengangkut sampah.” (Wawancara, 28 April 2025).

Adapun norma timbal balik antara kelembagaan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung adalah terjalinnya kerjasama untuk mengatasi permasalahan sampah, sehingga timbulan sampah menurun dan permasalahan sampah

selesai dari sumbernya. Di sisi lain, kelembagaan masyarakat mendapatkan dukungan dari DLH Kota Bandung berupa pendampingan wilayah dan alat-alat seperti gerobak pengangkut sampah organik, ember sampah organik, alat pertanian (cangkul, arit, dll), bak sampah, sarung tangan, maggot, dll (Wawancara, 28 April 2025).

Selanjutnya norma timbal balik yang didapatkan antara kelembagaan masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung adalah saling membantu dalam program percepatan penurunan stunting karena hasil bahan pangan yang ditanam dengan media tanam yang berasal dari sampah organik dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan keluarga balita yang ikut penimbangan di posyandu. Keuntungan lainnya adalah kelembagaan masyarakat diberikan dukungan berupa bibit-bibit sayuran, bibit ternak lele, kemudian ember OTG, dll untuk dikelola sehingga kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas terintegrasi dengan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan (Wawancara, 24 April 2025).

Berikut norma timbal balik yang didapatkan antara salah satu kelembagaan masyarakat dengan perguruan tinggi adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat mengelola sampah organik rumah tangga secara mandiri, sehingga permasalahan sampah organik selesai sejak dari sumbernya. Hal ini membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Adapun dukungan yang didapatkan dari perguruan tinggi untuk kelembagaan masyarakat berupa alat pembubur sampah organik untuk pakan maggot, kemudian metode pengolahan sampah organik dengan model *octaco* (*octagonal composter*) (Wawancara, 28 April 2025). Dukungan tersebut membantu kelembagaan masyarakat untuk melakukan kegiatan, yang awalnya dalam memberikan pakan maggot berupa sampah organik harus dicacah manual sehingga prosesnya lama dan menjadi lebih cepat setelah adanya alat pembubur sampah organik, selain itu metode *octaco* membantu meringankan kelembagaan masyarakat dalam mengatasi sampah organik selain dengan rumah maggot dan rumah daun, hasil kompos dari *octaco* dapat dipergunakan

untuk menanam sayuran di rumah warga masing-masing.

Selanjutnya norma timbal balik yang didapatkan antara kelembagaan masyarakat seperti yang terjadi di salah satu wilayah Kelurahan Cipadung Kidul yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) membantu menampung sedekah sampah anorganik warga yang nantinya akan dimanfaatkan untuk operasional masjid. Selain itu norma timbal balik antara kelembagaan masyarakat di salah satu wilayah Kelurahan Cipadung Kulon dengan sektor dunia usaha adalah penggunaan lahan untuk dijadikan pertanian organik dan tempat pengolahan sampah organik.

Dampak dari adanya dukungan-dukungan dari masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta dan perguruan tinggi kelembagaan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas yang berkelanjutan. Selain itu dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kapasitas komunitas dan modal sosial yang pada akhirnya akan membentuk kesadaran masyarakat serta menimbulkan hubungan sosial (Mappasere et al., 2024). Sejalan dengan penelitian dari (Zahra et al., 2025) bahwa kolaborasi antara para *stakeholder* diperlukan untuk membuat sistem pengelolaan sampah, dalam penelitian ini tergambar jika sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik, maka akan mempermudah dalam mengakses dukungan dari luar organisasi, hanya perbedaan penelitian ini terletak pada aspek yang belum banyak dibahas yaitu mengenai modal sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan yang disesuaikan dengan konsep teori Modal Sosial dari Putnam salah satunya indikator teori norma timbal balik diketahui bahwa pemanfaatan modal sosial membantu kelembagaan masyarakat untuk mengakses dukungan dari para pemangku kepentingan atau *stakeholder* seperti dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, lalu mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi, dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu modal sosial sangat penting dilakukan

untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dapat dicapai sendiri karena terhambat dengan banyak keterbatasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial dari Putnam dengan indikator yang terdiri dari kepercayaan, jaringan keterlibatan sipil dan norma timbal balik, dari ketiga indikator teori modal sosial, indikator teori yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah norma timbal balik, karena beberapa kelembagaan masyarakat di Kecamatan Panyikeukan mampu membangun jejaring dan mengakses sumber daya sebagai dukungan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Zero Waste Indonesia. (2023). *Menilik Alasan di Balik Bandung 'Masih' Darurat Sampah, dan Solusi Berkelanjutan yang Telah Ada – Aliansi Zero Waste Indonesia*. Aliansi Zero Waste Indonesia.
- Dina, Zakaria, M., Iskandar, E., & Suherlan, R. H. (2024). Implementasi Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) Sampah di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung. *Neo Politea*, 5(1), 25–35.
- Djulianti, Y., & Ainun, S. (2018). Identifikasi Tingkat Pengurangan Sampah dengan Adanya Program Kawasan Bebas Sampah (Studi Kasus RW 7 Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 24(4), 79–91.
- Farahristanti, F., & Wardhani, E. (2024). *Evaluasi Teknologi Pengolahan Sampah Organik dengan Program Kang Pisman Berbasis Kawasan Bebas Sampah*. Intitut Teknologi Nasional.
- Fatonah, N. (2025). Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Desa: Studi Etnografi di Kabupaten Garut. *Jurnal Sosial Nusantara*, 1(1), 9–13.
- Fidowaty, T., & Nurnovianti, C. (2025). Effectiveness of Kang Pisman Program (Reduce , Separate and Utilise) in Waste Management in Bandung City. *International Journal of Computer in Law & Political Science*, 5, 34–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/injucolpos.vxix.xxxx>
- Khairussalam., Zulaikha, S., Nur, R. I., & Maimunah, S. (2024). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Journal, Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba*, 6(2), 909–918. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5280>
- Lasaiba, M. A. (2024). Strategi Inovatif untuk Pengelolaan Sampah Perkotaan : Integrasi Teknologi dan Partisipasi Masyarakat. *Geoforum: Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss1pp1-18>
- Mappasere, F. A., Nuryani, M., & Haerana. (2024). *Kolaborasi Untuk Masa Depan: Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Network Governance* (Burhanudin (ed.); 1st ed.). Penerbit Widina Media Utama.
- Montolalu, M. P. (2025). Pemberdayaan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Nanggulan , Kulon Progo , Yogyakarta oleh Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. *JAS: Jurnal Atma Sosiologika*, 2(1), 1–32.
- Mulyati, Y., Hadayanti, D., & Rohiman, A. (2024). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Perekonomian Pasca Bencana Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Mangunkerta). *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora, Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 86–98.
- Mulyawati, L., Alamsyah, K., & Firdausijah, T. (2024). Pendampingan Program Tabung Sampah dapat Emas Bank Sampah Resik di Kota Bandung. *SEWAKADARMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–5.
- Munif, F. (2022). Pengembangan Madrasah melalui Modal Sosial. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 84–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v8i1.5133>
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). Modal Sosial dan Pembangunan Masyarakat. In *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam*

- Raflessia*. Yayasan Sahabat Alam Raflessia.
- Sendari, W. N., & Sufianti, E. (2024). Perspektif Triple Bottom Line Pada Praktik Pengelolaan Berkelanjutan Bank Sampah Induk Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0 Politeknik STIA-LAN Bandung*, 8(1), 211–219.
- Sitompul, D. J., & Laksmono, B. S. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kang Pisman Di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 1–13. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15044](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15044)
- Sudarmono. (2021). *Pembangunan Modal Sosial*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Suhendar, D. (2021). Efektivitas Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengurangi Produksi Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung). *Neo Politea*, 2(2), 1–15.
- Yunita, Nurmalasyari, Ulia, A. R., Ardiansyah, M. F., Inayah, A. U., & Salsabila, G. V. (2025). Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1786–1797.
- Zahra, F. A., Febriyanti, N. S., Astuti, S., & Septiadi, M. A. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara di (TPS) Pasar Baleendah. *Jurnal Solo Teknologi*, 1(2), 1–7.